

SOSIALISASI PENDIDIKAN INKLUSI DI PAUD

Mahkamah Brantasari¹, Reni Ardiana², Rizqy Syafrina³, Andi Aslindah⁴,
Sulastris⁵, Husniah⁶

Universitas widya Gama Mahakam Samarinda

mahkamah@uwgm.ac.id¹ reniardiana@uwgm.ac.id² rizqy@uwgm.ac.id³
andi.aslindah@uwgm.ac.id⁴ Lastrilastone11@gmail.com⁵ hoesniah@gmail.com⁶

Abstrak

Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang menjamin setiap anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), mendapatkan hak yang sama untuk belajar dan berkembang bersama teman sebaya di lingkungan pendidikan yang ramah dan mendukung. Sosialisasi pendidikan inklusi di satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran para guru, pengelola lembaga, mahasiswa calon pendidik, dan orang tua terhadap prinsip dan implementasi pendidikan inklusif. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan tentang konsep inklusi, prinsip pelaksanaannya di PAUD, serta peran semua pihak dalam menciptakan lingkungan belajar yang setara dan adaptif terhadap keberagaman. Melalui seminar interaktif, peserta diberikan pemahaman teoretis dan praktis untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di lembaga masing-masing. Diharapkan hasil dari sosialisasi ini mampu menjadi stimulus dalam penguatan kapasitas pendidik dan pengelola PAUD dalam mewujudkan layanan pendidikan yang adil, ramah, dan berkualitas bagi semua anak.

Kata kunci: pendidikan inklusi, PAUD, anak berkebutuhan khusus, sosialisasi, layanan pendidikan ramah anak.

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tingkat pendidikan yang berlangsung sebelum pendidikan dasar, yang memiliki tujuan untuk mengasuh dan membimbing mulai anak lahir hingga usia enam tahun. Mengasuh dan membimbing ini dilakukan dengan memberikan berbagai rangsangan edukatif guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik maupun mental, sehingga mereka siap melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Pendidikan Anak Usia Dini adalah bentuk pendidikan yang difokuskan pada pemberian landasan awal bagi tumbuh kembang anak. Tujuannya adalah untuk mendukung lima aspek utama perkembangan anak, yaitu: perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan fisik (termasuk koordinasi motorik halus dan kasar), perkembangan kognitif (meliputi kemampuan berpikir dan berkreasi), perkembangan sosial-emosional (terkait sikap dan pengendalian emosi), serta perkembangan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Semua aspek ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik unik dan tahapan perkembangan masing-masing usia anak (Permendiknas, 2009).

Anak usia dini sebagai individu, merupakan makhluk hidup yang memiliki kesatuan antara fisik dan mental secara menyeluruh, lengkap dengan struktur biologis serta aspek

psikologis yang membentuknya sebagai pribadi yang khas dan unik. Sebagai makhluk sosial dan budaya, anak dalam berproses sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang setara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau mengalami hambatan belajar, seperti kesulitan dalam membaca (disleksia), menulis (disgrafia), menghitung (diskalkulia), maupun individu dengan disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia yang memiliki gangguan atau hambatan dalam belajar berhak memperoleh pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesulitan yang dimilikinya. Namun, pada kenyataannya, jumlah anak penyandang disabilitas yang mendapatkan akses pendidikan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pola pikir masyarakat yang cenderung mengabaikan potensi yang dimiliki oleh anak-anak dengan disabilitas.

Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak-anak lain seusianya di sekolah umum yang berada paling dekat dengan tempat tinggal mereka (Sapon-Shevin dalam O'Neil, 1994). Pendidikan inklusif di Indonesia masih sedikit yang mengenalinya dan tergolong baru sehingga hanya sedikit sekolah yang benar-benar telah melaksanakannya. Konsep pendidikan inklusif dikembangkan atas dasar keyakinan bahwa setiap orang, tanpa melihat situasi terdahulunya atau kondisi, mempunyai potensi untuk belajar, tumbuh, berkembang, serta berinteraksi dengan lingkungan sekolah dan orang-orang yang ada disekitarnya, tempat kerja, dan dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, tanpa pengecualian, termasuk anak-anak yang memiliki Berkebutuhan Khusus dapat memperoleh layanan pendidikan melalui Program (PAUD). Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa PAUD merupakan upaya pembinaan yang diperuntukkan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun, dengan cara memberikan rangsangan pendidikan guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental anak, agar mereka siap melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (Pasal 1, poin 14). Sementara itu, Pasal 28 menjelaskan bahwa PAUD dilaksanakan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal dan nonformal seperti Taman Kanak-kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau bentuk lainnya yang sejenis, serta melalui jalur pendidikan informal seperti pengasuhan dalam keluarga atau yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, alasan mengapa perlu dilaksanakan pendidikan inklusif dan menjadi penting adalah karena anak-anak berkebutuhan khusus termasuk kelompok yang sering diabaikan, tertinggal, rentan, sangat membutuhkan perhatian, kerap mengalami perlakuan tidak adil, menjadi minoritas, serta paling sering mengalami diskriminasi, namun pada saat yang sama, mereka juga memiliki nilai yang sangat mulia (Sisdiknas, 2003).

METODE

Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk seminar sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat. Narasumber berfokus pada tema Pendidikan Inklusif di PAUD, dengan harapan dapat memberikan wawasan dan keterampilan tidak hanya bagi para guru dan pengelola lembaga PAUD, tetapi juga kepada mahasiswa Program Studi PG-PAUD serta orang tua peserta didik. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya pendidikan inklusif dalam mendukung perkembangan anak usia dini secara menyeluruh..

Seminar ini dilaksanakan pada pukul 09.30 pagi hingga 12.00 siang, dengan sasaran utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi guru PAUD, penyelenggara atau pengelola lembaga PAUD, mahasiswa khususnya mahasiswa dari Program Studi PG-PAUD serta orang tua peserta didik. Sebagai bentuk upaya untuk memberikan solusi yang operasional terhadap berbagai tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif di lingkungan PAUD, maka diusulkan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan pemahaman konsep pendidikan inklusif melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif.
- b) Penguatan kapasitas pendidik dan pengelola PAUD dalam menghadapi keragaman kebutuhan anak.
- c) Keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung proses pendidikan anak berkebutuhan khusus.
- d) Kolaborasi lintas pihak untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang ramah dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif saat ini menjadi salah satu model layanan pendidikan yang sedang populer. Selain itu, Deklarasi Harbin tahun 1993 (Deklarasi, 1993), dan Pernyataan Salamanca (Salamanca, 1994), semakin memperkuat keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Kedua dokumen tersebut menekankan pentingnya menghargai keberagaman sebagai dasar untuk memperkaya pengalaman belajar dan mengembangkan potensi siswa. Konsep ini dikenal sebagai pendidikan inklusif, yang bertujuan agar seluruh siswa dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam proses pembelajaran.

Sosialisasi pendidikan inklusi di PAUD memiliki peranan penting dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang konsep inklusi dan meningkatkan penerimaan terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan. Hasil Sosialisasi yang diharapkan adalah

- a) Adanya peningkatan kesadaran yang mana sosialisasi membantu orang tua, guru, dan masyarakat umumnya untuk lebih sadar akan pentingnya inklusi dalam pendidikan anak usia dini. Mereka semakin menyadari bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dan bermutu, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus
- b) Peserta sosialisasi, baik itu orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya, dapat memahami konsep inklusi secara lebih mendalam. Mereka belajar tentang prinsip-prinsip inklusi, seperti keberagaman, kesetaraan, dan partisipasi aktif semua anak dalam proses pembelajaran. Melalui sosialisasi, guru PAUD dan staf sekolah dapat mengembangkan keterampilan khusus dalam mengelola kelas inklusif, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan beragam anak, dan memberikan dukungan individual kepada setiap anak.
- c) Sosialisasi menciptakan kesempatan bagi para peserta untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan dukungan antar sesama. Hal ini penting untuk meningkatkan kolaborasi antar guru, orang tua, tenaga medis, dan lembaga terkait lainnya dalam memberikan layanan pendidikan inklusif yang berkualitas.

Pendekatan inklusif dalam pendidikan mengusung prinsip bahwa setiap anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di lingkungan yang ramah dan terbuka. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari deskripsi tersebut adalah:

- a) Pendekatan inklusif memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua anak, tanpa memandang perbedaan apa pun, baik itu kebutuhan khusus maupun tidak.
- b) Lingkungan pembelajaran di pendidikan inklusif dirancang untuk menjadi ramah dan terbuka bagi semua anak. Ini menciptakan atmosfer yang mengundang dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap individu.
- c) Pendekatan inklusif merangkul semua perbedaan, baik itu dalam hal kemampuan, kebutuhan, latar belakang budaya, atau lainnya. Ini menghargai keberagaman dan menghormati hak setiap individu untuk diperlakukan secara adil dan setara.
- d) Pendidikan inklusif bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang mungkin menghalangi partisipasi anak-anak dalam proses pembelajaran. Ini termasuk penyesuaian lingkungan fisik, penggunaan strategi pembelajaran yang diferensiasi, dan dukungan individu yang sesuai.

Dengan menerapkan konsep pendidikan inklusif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berdaya, dan memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk meraih potensi mereka sepenuhnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.

Pendidikan inklusif memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan pendekatan integrasi. Fokus utama dari pendidikan inklusif adalah memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus terlibat dalam seluruh aspek program dan aktivitas di sekolah, bukan hanya sebagian kecil sebagaimana yang umum terjadi pada pendekatan integrasi (Smith dkk, 2005). Dalam pendekatan ini, pengelompokan terpisah seperti kelas atau unit khusus dianggap tidak sesuai. Kelas reguler seharusnya menjadi ruang bersama di mana semua anak, meskipun memiliki kebutuhan belajar yang beragam, dapat berpartisipasi, merasa memiliki, bekerja sama, dan saling berbagi (Inclusion, 1998).

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki hambatan serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan inklusif bertujuan memberi ruang bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mengembangkan potensi dan minat mereka melalui layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individual masing-masing (Kemdiknas, 2009).

1. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

UNESCO dalam The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994) menetapkan sejumlah prinsip utama yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pertama, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan harus diberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Kedua, setiap anak memiliki keunikan dalam hal karakter, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajarnya masing-masing. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus dirancang serta dijalankan dengan memperhatikan keberagaman kebutuhan dan keunikan peserta didik. Anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus seharusnya dapat belajar di sekolah Umum, yang harus mampu menyesuaikan diri dan menyediakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekolah Umum yang menerapkan pendekatan inklusif dinilai sebagai cara yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan ramah, serta mewujudkan pendidikan untuk semua. Selain itu, pendekatan ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya dalam sistem pendidikan secara keseluruhan (Statement, 1994).

Berikut adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif menurut Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusi dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007:

- a) Prinsip Pemerataan dan Peningkatan Mutu
Pemerintah memiliki kewajiban untuk merancang strategi yang menjamin akses pendidikan yang merata serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan inklusif menjadi salah satu strategi efektif dalam memperluas akses pendidikan, terutama dalam menjangkau anak-anak yang belum mendapat akses terhadap layanan pendidikan formal. Selain itu, pendidikan inklusif pendekatan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, karena pendekatannya yang variatif dan menghargai keragaman kebutuhan peserta didik (UNESCO, 2009).
- b) Prinsip Kebutuhan Individual
Anak-anak memiliki perbedaan dalam kemampuan, latar belakang, dan kebutuhan belajar. Proses pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan dan metode pembelajarannya agar dapat mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didik (Mittler, 2000).
- c) Prinsip Kebermaknaan
Pendidikan inklusif hendaknya menciptakan lingkungan belajar yang bersifat inklusif dan ramah terhadap semua anak. Kelas harus menjadi tempat yang menyambut perbedaan, menghargai keanekaragaman, dan menjalin rasa saling menghormati antar siswa (Ainscow, 2005).
- d) Prinsip Keberlanjutan
Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak boleh bersifat parsial, tetapi harus dilanjutkan secara konsisten di semua jenjang pendidikan. Dengan kata lain, inklusi harus menjadi pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan dalam sistem pendidikan nasional (Booth T.& Ainscow M, 2011).
- e) Prinsip Keterlibatan
Keberhasilan pendidikan inklusif menuntut keterlibatan semua pihak yang terkait, termasuk guru, orang tua, masyarakat, serta pemerintah. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar mendukung setiap anak (Forlin C, 2010).

2. Prasyarat Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Sebelum pendidikan inklusif dapat diimplementasikan secara efektif, sejumlah syarat mendasar perlu dipenuhi. Pertama, harus terdapat dukungan kebijakan dari pemerintah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler. Kedua, kesadaran kolektif dan sikap positif dari sekolah serta para pemangku kepentingan sangat diperlukan, terutama dalam hal kesiapan untuk menerima dan memberikan pelayanan pendidikan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Ketiga, kompetensi guru menjadi elemen kunci, di mana guru perlu memahami karakteristik ABK dan memiliki keterampilan dasar dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai. Keempat, dibutuhkan kehadiran guru pembimbing khusus (GPK) yang dapat memberikan pendampingan serta dukungan dalam proses pembelajaran ABK.

Kelima, lingkungan fisik sekolah harus aksesibel, yang artinya fasilitas harus ramah dan dapat digunakan oleh peserta didik dengan berbagai jenis kebutuhan khusus. Keenam, sistem layanan akademik seperti kurikulum dan pembelajaran harus dirancang secara fleksibel dan adaptif agar sesuai dengan kebutuhan individual ABK. Terakhir, pelaksanaan layanan inklusif harus ditunjang dengan ketersediaan sarana pendukung, baik berupa alat bantu, media

pembelajaran, maupun layanan tambahan lain yang memperkuat proses pendidikan bagi ABK (Sunardi dkk, 2011).

3. Kurikulum PAUD dalam setting Inklusif

Kurikulum merupakan suatu rancangan yang terdiri atas rencana dan ketentuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang mencakup pengorganisasian tujuan, materi, proses, serta penilaian hasil belajar. Kurikulum yang diterapkan harus memiliki sifat fleksibel dan adaptif, agar dapat menyesuaikan dengan keragaman kebutuhan dan karakteristik perkembangan setiap anak. Secara garis besar, kurikulum pada PAUD mencakup standar kompetensi yang terbagi ke dalam enam area perkembangan utama anak, yaitu: nilai-nilai agama dan moral, keterampilan motorik (halus dan kasar), perkembangan sosial dan emosional, kemampuan berbahasa, kemampuan kognitif, serta kreativitas dalam seni.

Dalam penerapan PAUD inklusif, kurikulum tidak hanya memperhatikan keenam aspek perkembangan tersebut, namun juga harus memuat program-program khusus yang dirancang secara khusus untuk mendukung kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai potensinya. Pengembangan kurikulum PAUD Inklusif didasarkan pada sejumlah prinsip penting, antara lain:

- a) Kurikulum harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus anak, baik dari sisi kemampuan maupun hambatan yang dimilikinya.
- b) Penyesuaian bersifat individual, artinya setiap ABK membutuhkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan profil unik mereka.
- c) Tidak semua aspek perkembangan harus disesuaikan, tergantung pada kemampuan dan potensi yang dimiliki anak pada masing-masing bidang.
- d) Fleksibilitas penyesuaian dapat diterapkan dalam berbagai komponen pembelajaran, termasuk pada tujuan pembelajaran, materi ajar, metode/proses pelaksanaan, maupun evaluasi hasil belajar (Dirjen PAUD, 2020).

4. Model kurikulum PAUD inklusif mengikuti model kurikulum pendidikan inklusif

Dalam penerapan kurikulum inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), terdapat beberapa pendekatan penyesuaian yang digunakan agar pembelajaran tetap bermakna dan sesuai dengan kemampuan individual anak:

- a) Duplikasi
Model ini diterapkan ketika anak hanya mengalami hambatan pada salah satu aspek perkembangan tertentu. Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam koordinasi motorik halus, namun tidak memiliki hambatan dalam aspek lainnya, dapat mengikuti kurikulum yang sama seperti anak pada umumnya untuk bidang-bidang lain. Hanya bagian yang terkait motorik halus saja yang mungkin perlu adaptasi.
- b) Modifikasi
Kurikulum diubah atau disesuaikan secara khusus agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Misalnya, jika anak mengalami kesulitan memahami simbol angka abstrak, maka guru bisa mengadaptasi materi dengan media konkret atau aktivitas permainan numerasi sederhana.
- c) Substitusi
Beberapa elemen dari kurikulum reguler diganti dengan aktivitas atau materi yang berbeda namun memiliki nilai pembelajaran yang sepadan. Sebagai contoh, jika anak tidak dapat mengikuti kegiatan menulis panjang, ia dapat menggantinya dengan bercerita atau menggunakan gambar sebagai bentuk ekspresi.

d) Omisi

Dalam beberapa kasus, terdapat bagian kurikulum reguler yang dihilangkan karena benar-benar tidak bisa diakses atau dicapai oleh anak. Hal ini dilakukan jika penyesuaian atau penggantian tidak memungkinkan, sehingga bagian tersebut ditiadakan demi menjaga kebermaknaan dan keterjangkauan pembelajaran bagi anak (Kemendikbud, 2014).

5. Pembelajaran

Dalam lingkungan pendidikan inklusif, proses pembelajaran dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik belajar masing-masing peserta didik. Strategi pembelajaran tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan melalui Program Pembelajaran Individual (PPI) yang disusun berdasarkan hasil asesmen komprehensif terhadap kemampuan, kebutuhan, dan potensi anak. Program Pembelajaran Individual (PPI) merupakan dokumen rencana pembelajaran yang dirancang khusus untuk setiap anak berkebutuhan khusus (ABK), mencakup tujuan pembelajaran, metode, media, serta bentuk evaluasi yang relevan dengan kebutuhan individual anak. PPI disusun berdasarkan hasil asesmen awal dan berkelanjutan yang mencerminkan kondisi aktual peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif (Direktorat Pembinaan, 2014).

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu syarat penting dalam implementasi PAUD inklusif adalah tersedianya lingkungan belajar yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi semua anak. Lingkungan ini mencakup sarana fisik seperti lahan, bangunan sekolah, ruang kelas, ruang administrasi, dan fasilitas khusus yang mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK), seperti ruang kedap suara untuk anak tunarungu, alat bantu komunikasi dan pembelajaran untuk anak autisme, serta berbagai media pembelajaran adaptif. Fasilitas tersebut harus dirancang untuk memfasilitasi proses belajar secara optimal bagi setiap anak, terlepas dari kondisi dan kebutuhannya.

7. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pendidikan merujuk pada individu-individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Dalam konteks PAUD dan pendidikan inklusif, SDM meliputi:

a) Pendidik/Guru PAUD

Guru memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses belajar anak. Mereka dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Pada pendidikan inklusif, guru juga harus mampu mengenali kebutuhan khusus anak dan menerapkan pendekatan yang sesuai.

b) Tenaga Kependidikan

Meliputi kepala sekolah, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya yang turut membantu kelancaran operasional lembaga pendidikan. Efisiensi dan profesionalisme mereka turut menentukan kualitas layanan pendidikan.

c) Orang Tua/Wali

Keterlibatan orang tua sangat penting dalam menunjang perkembangan anak. Kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua akan mendukung pendidikan yang lebih holistik.

d) Tenaga Ahli/Spesialis

Dalam pendidikan inklusif, keberadaan psikolog, terapis wicara, terapis okupasi, atau konselor sangat dibutuhkan untuk membantu menangani anak berkebutuhan khusus (ABK) secara tepat.

e) Mahasiswa atau Calon Pendidik

Mahasiswa dari program studi PAUD atau pendidikan luar biasa yang sedang menjalani praktik atau pengabdian juga termasuk bagian dari SDM yang dapat memberikan kontribusi terhadap layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

8. Evaluasi Pembelajaran Dalam Pendidikan Inklusif

Evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian peserta didik terhadap kompetensi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, evaluasi mencakup lima aspek utama, yaitu materi yang dievaluasi, waktu pelaksanaan, metode yang digunakan, instrumen penilaian, serta lokasi evaluasi. Berdasarkan Permendiknas No. 70 Tahun 2007 tentang Pendidikan Inklusif, penilaian hasil belajar peserta didik dalam sistem pendidikan inklusif harus mengacu pada kurikulum yang diterapkan di masing-masing satuan pendidikan. Evaluasi ini dilandasi oleh prinsip kesinambungan, menyeluruh, objektif, dan bersifat kolaboratif (Kemdiknas, 2007).

9. Pengelolaan

Standar pengelolaan merujuk pada serangkaian aktivitas manajerial dalam lembaga PAUD Inklusif yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pendidikan. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan setiap anak terpenuhi secara optimal serta menjamin keberlanjutan layanan pendidikan inklusif bagi anak usia dini. Pengelolaan ini mencakup dua aspek utama:

- a) Administrasi Lembaga, yang meliputi kegiatan pencatatan dan pengelolaan data peserta didik beserta perkembangannya, data kelembagaan, serta administrasi keuangan dan program.
- b) Pengelolaan Sumber Belajar dan Media, yang mencakup proses pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan alat bermain, media pembelajaran, serta berbagai sumber belajar lainnya yang mendukung proses pembelajaran (Kemdikbud., 2011).

10. Prosedur Penerimaan Siswa ABK

Dalam proses penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) pada satuan PAUD Inklusif, terdapat beberapa tahapan penting yang harus diperhatikan untuk memastikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Tahapan tersebut meliputi:

- a) Pendaftaran, yaitu proses awal yang dilakukan oleh orang tua atau wali untuk memasukkan anak ke lembaga PAUD Inklusif.
- b) Deteksi Dini Tumbuh Kembang, yang bertujuan mengidentifikasi secara awal aspek perkembangan anak, baik fisik, kognitif, sosial, maupun emosional.
- c) Identifikasi, yaitu proses pengenalan karakteristik khusus anak, termasuk potensi dan hambatan yang dimilikinya.
- d) Asesmen, yakni penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh tim profesional guna mengetahui kebutuhan dan layanan pendidikan yang tepat bagi anak.
- e) Komunikasi Hasil Asesmen, hasil asesmen harus disampaikan kepada orang tua secara terbuka dan jelas agar mereka memahami kondisi dan kebutuhan anak.
- f) Kesepakatan atau MoU dengan Orang Tua, sebagai bentuk persetujuan bersama antara lembaga PAUD dan orang tua terkait layanan pendidikan, peran masing-masing pihak,

serta dukungan yang dibutuhkan anak selama menjalani pendidikan inklusif (Kemendikbud, 2015).

11. Rasio ABK dalam PAUD Inklusif

Dalam penyelenggaraan PAUD Inklusif, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) dalam satu rombongan belajar (rombel) idealnya tidak melebihi dua anak, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kesiapan lembaga. Penetapan rasio ini harus disesuaikan dengan kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individual anak. Selain itu, tingkat hambatan atau gangguan perkembangan yang dialami oleh ABK juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan penerimaan. Apabila seluruh aspek pendukung, seperti kompetensi guru, fasilitas, dan sumber daya memadai, maka penempatan dua ABK dalam satu rombel dapat dilaksanakan. Namun, apabila kondisi belum memungkinkan, maka menempatkan satu ABK dalam setiap rombel menjadi langkah yang lebih tepat dan bijaksana untuk memastikan kualitas layanan pendidikan yang inklusif dan efektif.

12. Keterlibatan Orang Tua

Penyelenggara PAUD Inklusif dituntut untuk melibatkan peran aktif orang tua, baik dari anak berkebutuhan khusus (ABK) maupun anak-anak lainnya, dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui beberapa cara berikut:

- a) Memberikan dukungan dan fasilitas kepada orang tua anak berkebutuhan khusus agar mereka terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan anak.
- b) Menjadi pendamping anak, terutama pada kondisi tertentu di mana anak memerlukan bantuan intensif sampai mencapai kemandirian.
- c) Menjalin kolaborasi dengan guru, misalnya melalui kegiatan bersama dalam pembuatan media pembelajaran dan alat permainan edukatif sederhana.
- d) Berpartisipasi dalam diskusi pengembangan PPI (Program Pembelajaran Individual) bersama guru dan tenaga ahli, berdasarkan hasil asesmen profil anak.
- e) Melibatkan keluarga secara menyeluruh, termasuk orang tua dan anggota keluarga lainnya, dalam proses pengembangan potensi dan keterampilan anak.
- f) Membentuk komunitas orang tua ABK, yang berfungsi sebagai wadah berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus.

13. Evaluasi Penyelenggaraan PAUD Inklusif

Keberlanjutan pelaksanaan program PAUD Inklusif ditentukan oleh proses evaluasi yang berkesinambungan. Evaluasi ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- a) Keberlangsungan program, yang menilai sejauh mana program dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
- b) Tingkat pencapaian tujuan, yang mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam program inklusif.
- c) Identifikasi faktor penghambat, yaitu analisis terhadap kendala atau tantangan yang menghambat keberhasilan program.
- d) Strategi penyelesaian hambatan, berupa langkah-langkah konkret yang dirancang untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program.

Agar penyelenggaraan PAUD Inklusif dapat terus berjalan secara efektif, pihak penyelenggara perlu secara rutin melakukan observasi, evaluasi, serta menangani berbagai permasalahan secara dini dan tepat.

Penguatan kebijakan memiliki peran strategis sebagai forum untuk meninjau dan mengembangkan kebijakan-kebijakan pendidikan inklusif yang relevan, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan baru yang lebih adaptif dan berpihak pada semua anak. Upaya ini penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif secara menyeluruh, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di sisi lain, evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program sosialisasi pendidikan inklusi menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi untuk menilai sejauh mana pemahaman serta implementasi konsep inklusi di satuan PAUD. Hasil dari proses evaluasi ini kemudian dapat dijadikan dasar untuk menyempurnakan program ke depannya.



Dokumentasi: pribadi

Pelaksanaan sosialisasi pendidikan inklusi di PAUD diharapkan benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses, penerimaan, dan mutu layanan pendidikan bagi seluruh anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

KESIMPULAN

Pendidikan inklusif memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan pendekatan integrasi. Dalam pendidikan inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus tidak hanya diberi akses, tetapi juga diikutsertakan secara penuh dalam seluruh kegiatan dan program sekolah. Hal ini berbeda dengan pendekatan integratif yang cenderung masih memberikan ruang terbatas bagi keterlibatan siswa berkebutuhan khusus. Prinsip utama dari pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk belajar bersama, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan apa pun. Ini menuntut sekolah umum untuk memiliki kesiapan dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan baik dalam akses maupun partisipasinya. Menurut Smith (2005), tujuan utama pendidikan bagi anak-anak yang memiliki hambatan adalah keterlibatan aktif dalam keseluruhan aktivitas sekolah. Inklusi tidak hanya bermakna kehadiran secara fisik, tetapi juga mencakup penerimaan anak dalam kurikulum, lingkungan sosial, serta dalam nilai-nilai dan visi-misi yang dianut oleh sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M. (2005). *Developing inclusive education systems: What are the levers for change?* Journal of Educational Change.
- Booth T.& Ainscow M. (2011). *The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.
- Deklarasi. (1993). *Harbin Declaration on Special Needs Education*. Harbin, China: UNESCO.
- Direktorat Pembinaan. (2014). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Direktorat Pembinaan. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dirjen PAUD. (2020). *Kurikulum PAUD: Panduan untuk Guru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
- Forlin C. (2010). *Teacher Education for Inclusion: Changing Paradigms and Innovative Approaches*. Routledge.
- Inclusion, i. (1998). *Inclusion International*. Inclusion International.
- Kemdikbud. (2011). *Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemdiknas. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2007 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Kemdiknas.
- Kemdiknas. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Kemdiknas.
- Kemendikbud. (2014). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Kemendikbud. (2015). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mittler, P. (2000). *Working Towards Inclusive Education: Social Contexts*. . David Fulton Publishers.
- PAUD, D. P. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Permendiknas. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kemendiknas.
- Salamanca, P. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Salamanca, Spain: UNESCO.
- Sapon-Shevin dalam O'Neil, J. (1994). *Can all children learn? A conversation about inclusion*. New York: Educational Leadership ASCD.
- Sisdiknas, U. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Smith dkk. (2005). *Teaching students with special needs in inclusive settings*. Allyn & Bacon.

- Statement, S. (1994). *he Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education: World Conference on Special Needs Education: Access and Quality*,. Paris: UNESCO.
- Sunardi dkk. (2011). *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (2009). *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. . Paris: UNESCO.